

Analisis terhadap kasus perkara gugatan Muhamad Daivi melawan Pemerintah RI CQ Departemen Luar Negeri atas dasar perbuatan melanggar hukum

Warsiyatno, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202142&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Belum terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara., perkara-perkara gugatan terhadap aparat negara atas dasar perbuatan melanggar hukum diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri, sehingga timbul adanya anggapan bahwa seolah-olah pelaksanaan pengadilan tersebut tidak obyektif

Karena disatu pihak hakim sebagai aparat pemerintah, di lain pihak yang diadili adalah dari pihak pemerintah juga.,

Penafsiran secara analogi: terhadap pasal 28 · Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, hakim tersebut di atas seharusnya mengundurkan diri karena yang diadili masih termasuk anggota yang dihadapi.

Atas dasar masalah tersebut penulis tertarik untuk menganalisis suatu kasus gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah, apakah dalam menangani kasus tersebut hakim dapat bertindak secara obyektif.